



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



## Membedah Perda, Membenahi Desa

## Desa: Ujung Tombak Pembangunan



Foto: Ikhshan/dk

Desa seringkali hanya dijadikan tempat untuk melabuhkan rindu akan hijaunya alam, kebersahajaan tradisi, dan indahny seni. Setelah rindu itu tertumpah, desa kembali ditinggal pergi. Itulah mungkin alam pikiran orang kota.

Bagaimana dengan mereka yang berdomisili di desa? Tak jauh beda. Desa adalah tempat istirahat, dan kota adalah tempat kerja. Malam tidur di desa, siang mencari nafkah di kota.

Padahal desa jauh lebih banyak daripada kota. Di Kabupaten Cirebon, ada 412 desa, dan 12 kelurahan. Lantas di manakah harusnya tempat prioritas pembangunan itu? Desa atau kota?

Jika ingin Kabupaten Cirebon maju, maka fokus pembangunan harusnya di desa, bukan? Ya, desa harus menjadi ujung tombak pembangunan, meski kota juga tetap harus dibangun.

Jika semua desa maju, maka segala indikator pembangunan Kabupaten Cirebon tentu akan terdongkrak. Tidak ada lagi angka statistik Kabupaten Cirebon peringkat pertama tingkat pen-

gangguran tertinggi, dan ranking lima kemiskinan se-Jabar.

Membangun Kabupaten Cirebon berarti membangun desa. Disinilah, pemerintahan desa menjadi strategis. Maju mundurnya desa ada di tangan kebijakan mereka.

Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi desa dan pemerintahan desa, edisi *Cirebon Katon* kali ini membuat *Fokus* liputan tentang pemerintahan desa. Berbagai permasalahan coba digali dan diungkap baik dari sisi perangkat desa, kuwu, maupun BPD.

Tentu saja harapannya permasalahan itu bisa dijadikan masukan bagi DPRD untuk membuat kebijakan baik secara legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Tentu saja laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Redaksi berharap informasi tambahan dari pembaca yang bisa dikirakan ke email redaksi setelah edisi ini.

Selamat membaca majalah, dan membaca desa. Kami menunggu bacaan Anda tentang desa di lingkungan Anda. Salam *Cirebon Katon!*

### Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

### Pengarah :

**Muklisin Nalahudin, SH, MH.**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**Abdul Rohman**  
(Ketua Komisi 1)

**Mad Saleh**  
(Ketua Komisi 2)

**H. Hermanto, SH**  
(Ketua Komisi 3)

**Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM**  
(Ketua Komisi 4)

### Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

### Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Susilaningrat**  
(Kabag persidangan)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Perundang-undangan)

### Redaktur Pelaksana :

**Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

### Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

### Penyunting :

**Wiwin Winarti, S.IP**  
(Kasubag Rapat dan Risaiah)

**Ardiles Afla Jatiwanto**  
(Kasubag Rumah Tangga)

### Redaktur :

**IA Fazri**

### Reporter :

**Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika**

### Fotografer :

**Alfian**

### Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

### Data dan Riset :

**Oman • Ihsan**

### Distribusi :

**Adiw**

### Korespondensi:

**redaksi.cika@gmail.com**

### Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**  
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon  
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

Membedah Perda, Membenahi Desa

10 | Ketua Asosiasi BPD Ibnu Katsir  
Pertegas Peran BPD Sebagai Mitra Kuwu



## 14 | KILAS

Peduli Desa Membangun



## 18 | PUBLIKA

Adakah Antisipasi Banjir Menjelang Penghujan?



## 20 | LENSA

Kerupuk Melarat  
Kisah Kreatif di Masa Sulit



## 22 | DINAMIKA KOMISI

Komisi I Pantau Tukar Guling Tanah Desa

24 | Komisi II Temukan Perizinan Usaha  
Tak Sesuai Tata Ruang

26 | Beberapa Ruas Jalan Rusak dan  
Terganggu Sampah

28 | Kurangnya Sarana Belajar SMPN 2 Kapetakan



## 30 | PROFIL

Fraksi Nasdem Kabupaten Cirebon  
Restorasi untuk Cirebon Katon



## 33 | INSPIRASI

Pengrajin Anyaman Bambu  
Konsisten Pada Nilai dan Mutu

## 36 | POTENSI

Pagar Gunung  
Sejuk Bak Dikelilingi Gunung

# Membedah Perda, Membenahi Desa

Masih banyak persoalan yang ada di Pemerintahan Desa dan BPD, perlukah merevisi Perda kembali?



Foto: foto: Ikhwan/ik

Rangkaian pemilihan kuwu (Pilwu) serentak 27 Oktober 2019 di Kabupaten Cirebon sudah selesai. Kuwu terpilih pun sudah dilantik. Namun, itulah awal jalan panjang perjuangan beberapa perangkat desa dimulai.

Sembilan perangkat desa di Gebang Kulon Kecamatan Gebang, misalnya, bersama-sama melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Mereka tidak terima dialihtugaskan oleh kuwu baru.

Didin Firmansyah semula sebagai Sekertaris Desa dialih-

tugaskan menjadi Staf Kadus 06 Gebang Kulon. Yuhani yang semula menjabat Kaur Perencanaan, menjadi Staf Kadus 02. Nurlaeli yang semula menjabat Kaur Keuangan, kini menjadi Staf Pemerintahan. Imron Rosidi yang semula Kaur Tata Usaha/Umum, menjadi Staf Kasi Kesejahteraan.

Selanjutnya Hasannudin, yang semula menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan menjadi Staf Kaur Perencanaan. Azat Zurat yang semula Kepala Dusun 01 menjadi Staf Kepala Dusun 05. Lalu, Rudi Kusnadi yang semu-

la Kepala Dusun 02 menjadi Staf Kepala Dusun 04. Bawon Suprianto yang semula Kepala Dusun 04 menjadi Staf Kepala Dusun 01. Terakhir, Zamroni yang semula Kepala Dusun 05 dialihkan menjadi Staf Kepala Dusun 03.

Mereka pun melaporkan kuwu terpilih karena telah merotasi jabatan mereka. Menurut mereka hal itu bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perangkat Desa.

Mereka mengaku gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim PTUN Bandung pada Agustus lalu. Pengadilan membatalkan

Surat Keputusan Nomor 141.1/Kep.006.-Sekret/2020 tanggal 3 Februari 2020, tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, beserta lampirannya.

Sama halnya dengan Didin dkk, Ahmad Tabrani, perangkat Desa Kalimekar, mengalami nasib yang sama: dialihtugaskan oleh kuwu baru. Namun, ia lebih memilih pasrah.

Seminggu pasca pilwu serentak, Kuwu terpilih menegaskan jika dirinya dan teman-teman perangkat lama tidak akan digunakan kembali atau akan diberhentikan dari perangkat desa. Dia pun menyadari hal itu karena sudah menjadi konsekuensi politik. "Semenjak kuwu baru terpilih, kita langsung merapat dan berkomunikasi dan siap menerima keputusan jika memang harus diberhentikan," ujarnya.

Tabrani bilang, jika memang akan memberhentikan perangkat desa yang lama, mereka hanya menuntut hak, karena di tahun pertama perangkat desa baru tidak menerima tunjangan berupa tanah bengkok. Tetapi, alih-alih diberhentikan dan haknya diberikan, ia bersama perangkat desa lama justru dimutasi ke bagian staf. Ia pun melakukan protes kepada kuwu terpilih.

Di sisi lain, menurut Sukardi SE, Kuwu Desa Karangwangi, adanya Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD), seringkali membuat perangkat desa merasa pongah, dan mengangap kuwu tidak mampu memecatnya. Ia berpendapat seharusnya seorang kuwu bisa mempunyai kewenangan dalam menentukan maupun memberhentikan perangkat desa.

Sementara, Sekretaris Desa Karang Wangi, Kecamatan Depok, Nurista'in, jus-



Hasan Ali, Ketua BPD Desa Dukuh Kecamatan Kapetakan

Foto: Dok. Hasan Ali/ik

tru mengatakan sebaliknya, kuwu tidak boleh diberikan kewenangan untuk memberhentikan para perangkat desa. Menurutnya nanti akan ada kesewenang-wenangan dari kuwu untuk gampang mencopot.

"Kalau soal terbenturnya para perangkat desa lama yang tidak mau mundur itu urusan lain. Karena justru yang terjadi, para perangkat desa juga akan mengundurkan diri tanpa diminta," tandasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori SE, mengatakan bahwa permasalahan yang mengganggu pemerintahan desa yang selalu dikhawatirkan adalah dinamika pergantian perangkat. Padahal secara regulasi itu jelas, pergantian perangkat tidak bisa dilakukan hanya sepihak saja, tanpa

alasan dan penilaian kinerja yang jelas.

Menurutnya, hal ini juga menjadi salah satu alasan DPRD Kabupaten Cirebon akan mengkaji kembali Perda Nomor 2 Tahun 2015 beserta perubahannya, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2017. Hal itu dilakukan demi menggali konten lokal yang solutif.

"Kami juga telah menerima saran untuk memasukan pasal bersifat administratif dalam penyelesaian masalah tersebut. Misalnya, jika ada pergantian perangkat yang alasannya mengundurkan diri, perlu dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, camat, dan saksi," jelasnya.

Kemudian, kata Hasan, pada saat akan terjadi pergantian NRPD, DPMD bisa memanggil yang bersangkutan terlebih



dahulu. Jadi, tidak hanya mengandalkan keterangan camat. “Walaupun regulasi menyatakan cukup dengan pihak camat,” katanya,

Selanjutnya, perlu membuat SOP atau mekanisme yang efektif dan transparan dalam proses pergantian perangkat, sebagai bentuk penjabaran dari amanat Peraturan Pemerintah atau Permen- dagri yang mengatur mekanisme pergantian perangkat desa.

“Bila perlu, ada keterlibatan tim penilai khusus dalam penilaian evaluasi kinerja atau pun proses seleksi perangkat yang baru. Terkait ide dan usulan ini tentunya kita tetap akan kaji kembali secara yuridis normatif nya, yang jelas, spiritnya adalah perubahan untuk lebih *fair* dan adil,” jelas anggota Fraksi PKB itu.

Ketua BPD Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Hasan Ali, menilai sejauh ini sosialisasi Perda tentang Pemerintah Desa dan BPD belum menyentuh masyarakat umum, sehingga hal itu juga menjadi salahsatu

penyebabnya. “Sekalipun dalam perubahan kedua Perda ia sangat setuju. Hanya saja saya saran perbaikan agar memasukan klausul baru,” jelasnya.

Pertama, kata Ali, perlu klausul ketegasan soal perangkat desa yang menjadi timses saat pilwu berlangsung. “Kalau ada perangkat desa yang jadi tim salah satu calon. Maka harus langsung dipecah saja,” jelas Ali.

Ali juga berpedapat, perlu adanya aturan umur bagi perangkat desa saat menjabat. “Dalam Perda masa pensiun perangkat desa itu kan 60 tahun. Supaya ada regenerasi, sebaiknya masa bakti sampai berusia 50 tahun saja,” katanya.

Ali pun berharap, baik legislatif maupun eksekutif dalam hal ini Camat harus mampu mensosialisasikan Perda secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat desa, agar hal ini bisa diketahui dan diimplementasikan oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Cirebon. “Apalagi di tahun depan Ka-

bupaten Cirebon akan melaksanakan pilwu serentak lagi, ini penting bagi desa-desa yang akan melaksanakan Pilwu,” paparnya lagi. Seperti diketahui, Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 dengan judul yang sama. Rencananya DPRD Kabupaten Cirebon akan merevisi kembali dan telah masuk dalam Propemperda.

“Secara substansi perubahan itu lebih kepada penambahan dan pengurangan poin-poin yang disesuaikan dengan kebijakan peraturan di atasnya,” ungkap Hasan Basori.

Hasan menjelaskan, bahwa secara keseluruhan arah pengaturan Perda Nomor 2 Tahun 2015 beserta perubahannya, Perda Nomor 1 Tahun 2017, adalah mengatur Pemerintahan Desa secara umum dalam tata cara pemilihan kuwu sampai dengan pelantikan dan juga proses pergantian, larangan, tugas dan tanggungjawab kuwu.

Selain itu, juga mengatur regulasi Perangkat Desa dan BPD. Mulai dari proses pengangkatan, tugas dan tanggung jawab, larangan, sampai jika terjadi kekosongan jabatan. Selanjutnya, mengatur sanksi-sanksi terkait pelanggaran yang mungkin dilakukan. Terakhir, Perda mengatur pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dari hal itu semua, kata Hasan, ada beberapa alasan substantif kenapa Perda akan direvisi kembali. Pertama, arah pengaturan pada Perda tersebut, yang masih mengacu umum pada kebijakan peraturan di atasnya. “Secara substansi belum banyak menggali kearifan lokal, terkait pemerintahan desa yang ada, jadi itu masih lemah,” jelasnya.



Kedua, secara umum, Perda lebih mengatur kelembagaan desa, belum mengatur terkait aset desa, keuangan desa, dan pemberdayaan masyarakat. “Artinya dalam konteks teori *Omnibus Law*, jika diterapkan pengaturannya, maka akan lebih terstruktur dalam mengatur pemerintahan desa dan problematikanya.”

Ketiga, terdapat koordinasi ganda di struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pemerintahan desa. “Memang secara teknis dan pengawasan prosesnya dilakukan oleh DPMD, tetapi beberapa poin, terdapat pengaturan koordinasi strukturnya masih ke bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Dalam hal ini, menurut hemat saya terkait kebijakan desa dan koordinasi *sectoral*, kita akan buat satu pintu saja di DPMD,” katanya.

Namun, terkait perubahan, Hasan sendiri belum bisa memastikan kapan akan segera direalisasikan. “Kita coba meli-

hat waktu yang ada, karena memang banyak Perda yang sedang menunggu. Dengan kata lain, penguatan aturan terkait pemerintahan desa atau BPD sementara dikuatkan dalam Perbup dulu,” jelasnya.

Menurutnya, Perda Nomor 1 Tahun 2017, setidaknya telah melahirkan 3 buah Perbup, yaitu : Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang perangkat desa, Perbup Nomor 64 Tahun 2018 tentang BPD, serta Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pilwu.

“Kita juga meminta kepada eksekutif agar ada perubahan Perbup Pilwu, agar ada aturan soal tim fasilitasi pilwu, tim keamanan pilwu dan tim pengawasan pilwu, serta tentang pilwu sistem e-voting yang rencananya akan diterapkan di tahun depan,” jelasnya.

**Peran BPD Kurang Maksimal**

Sejatinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting. Namun banyak yang mengeluhkan kinerja BPD,

terutama terhadap penyelesaian permasalahan desa. Di sisi yang lain BPD juga mengeluh, karena honor yang tak sebanding dengan tugas yang diemban. “Honor atau insentif BPD yang belum sesuai dengan tuntutan kerja,” jelas Ali.

Menjawab persoalan BPD, Hasan mengatakan, BPD mempunyai peran yang strategis, sebagai lembaga yang menyepakati RPJMDes, RKPDes dan juga APBDes. “Artinya jika BPD tidak sepakat dengan kuwu, maka pelaksanaan APBDes belum bisa dilaksanakan, maupun disahkan,” jelasnya.

Sedangkan soal insentif, Hasan mengamini bahwa memang belum layak. Karena selama ini, masih mengandalkan dari anggaran dana desa (ADD) Kabupaten Cirebon yang jumlahnya terbatas. Sedangkan penghitungan besaran pagu ADD, dipengaruhi oleh perolehan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten, dengan paling sedikit 10 persen. Sementara di satu sisi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 hanya menyebutkan bahwa ADD itu hanya untuk siltap kuwu dan perangkatnya.

“*Nah*, Pemkab Cirebon sebenarnya mengambil inisiatif dalam Perbup formulasi siltap itu adalah 12+1, yang dalam hal ini memikirkan tunjangan BPD. Ini menjadi PR kita untuk memikirkan kembali formulasi tunjangan BPD yang layak dari slot anggaran pemerintah,” tambahnya.

Hasan berharap, integritas dan kinerja BPD harus tetap maksimal. “BPD harus tetap profesional. Pemerintah juga harus memikirkan pembinaan berjenjang agar tidak muncul istilah BPD sebagai cap kuwu saja,” katanya. •suf

## Ketua FKCC Rochmat Hidayat: Jangan Formalkan Desa 'Kawin Paksa'

Kuwu baru dihadapkan pada pembentukan perangkat desa. Laiknya kabinet, para kuwu ingin agar punya kebebasan menentukan para pembantunya. Perangkat desa punya pendapat berbeda. Bagaimana menjembatani keduanya?

Persoalan pemerintahan desa saat ini sangat kompleks. Belum lagi saat Pilwu berlangsung, sederet masalah muncul dan berakhir di meja hijau. Perda dituntut agar lebih menerima masukan para kuwu-kuwu yang ada di Kabupaten Cirebon. Agar dapat mengetahui bagaimana sederet persoalan para kuwu dan pemerintahan desa, Reporter Cirebon Katon pun mewawancarai Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKCC), Rochmat Hidayat. Berikut petikannya:

### Permasalahan apa yang ada di Pemerintah Desa saat ini?

Masalah di antaranya, soal Pilwu, beberapa kuwu yang telah terpilih, terdapat celah gugatan keputusan hasil pilwu, salah satunya itu tentang hak memilih warga negara. Seolah-olah DPT yang disahkan itu harga mati. Padahal kondisi warga kita itu ada yang di luar kota dan luar daerah, hingga pleno DPT masih belum ter-cover. Akhirnya, ketika pemilihan terjadi persoalan.

Panitia klaim DPT itu hasil penetapan dan pengesahan. Itu kalau jumlahnya masif, kemudian digugat oleh pemilih, saya pikir panitia bisa kalah, karena dianggap menghalangi hak pemilih yang dilindungi oleh negara. Itu isu krusial sekarang. Sehingga saya berharap, bahwa



Foto: foto: Dok FKCC

pleno DPT tetap harus dilaksanakan, tetapi ketika pemilihan berlangsung, warga yang datang dan belum masuk DPT selama membawa KTP, tetap bisa memilih layaknya pemilu biasa.

Kemudian berkaitan para kuwu. Kita juga memaklumi SDM kuwu di Kabupaten Cirebon itu beragam, dan latarbelakang kuwu juga berbeda. Jadi saya kira, pemerintah daerah tetap harus memberikan penguatan dalam meningkatkan kapasitas kepala desa. Peningkatan itu penting bagi kuwu sebagai pemangku kebijakan, maupun sebagai kelembagaan

pemerintah desa.

Sekalipun sudah ada kecamatan, sebagai pembina dari kepanjangan bupati. Tetapi, belum cukup memadai. Memang perlu ruang-ruang secara intensif dalam memberikan kapasitas kelembagaan kepada pemerintahan desa.

### Selain itu, bagaimana dengan efektifitas pembentukan perangkat desa?

Nah, harusnya pemerintah sekarang mulai sadar bahwa ada gap regulasi. Kenyataannya antara kuwu dengan regulasi yang ada itu, acap kali sering berben-

turan antara psikologi desa baik secara sosial-politik dengan regulasi yang ada.

Ketika kuwu itu jadi, sudah diikat dengan regulasi bagaimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Namun sejatinya psikologi desa dan kuwu terpilih itu bersama para pendukungnya menghendaki ingin punya kabinet sendiri sesuai visi misi kuwu itu. Namun tidak bertemu antara regulasi dengan psikologi masyarakat desa. Kalau regulasi itu formal dan baku, dimana mengatur seorang kuwu tidak boleh memecat dan tidak perkenankan memang, di sisi lain secara psikologi kuwu ketika perangkat desa tidak cocok, ya repot juga.

Ibaratnya Kuwu yang punya Rumah mau kepala rumah dengan pembantunya masa gak nyambung, itu kan ada gapkan. Itu yang seharusnya kedepan harus dibuka ruang oleh regulator di atas berkaitan pemerintah desa terutama pihak kecamatan. Persoalannya selalu sama antara kuwu baru terpilih dengan perangkat desa yang lama.

Harusnya ada kearifan lokal yang diaminkan oleh aturan. Logika sederhannya seorang presiden bisa mengangkat atau memecat kapan saja menterinya, tidak perlu ada aturan lain sebagainya. Ketika presiden berganti, menteri juga ganti, sesuai kehendak presiden.

Nah kalau di kuwu kan persoalannya berbeda. Kita diikat oleh aturan sendiri kemudian kuwu tidak bisa menabrak regulasi itu. Sehingga yang perlu digarisbawahi sekali lagi ruang kearifan lokal itu, kemudian diakomodasi dalam regulasi. Kearifan lokal di antaranya, kewenangan, hak asal usul desa setidaknya bisa diakomodasi.



Jangan sampai mengatur desa hanya dalam unsur formil saja, kering nantinya.

### Apa yang dimaksud Anda hak asal-usul desa?

Negara dengan desa itu, lahirnya desa dulu, Pangeran Cakrabuana dan Ki Gedeng Alang Alang dulu yang membuat desa sebelum kemudian diformilkan oleh NKRI.

Bapaknya Mbah Kuwu Cirebon itu diangkat jadi Tumenggung Sri Manggana, formalitas desa lahir dari hikayat itu, kemudian lambat laun diserahkan kepada Sunan Gunung Jati.

Kemudian Tahun 1428 saka, Cirebon menyatakan kemerdekaan dan tidak akan membayar upeti kepada Kerajaan Pajajaran, momentum itu yang ditetapkan menjadi hari jadi Kabupaten Cirebon.

Itu yang sebenarnya pemerintah harus apresiasi kepada desa. Jangan semuanya diatur formilkan sehingga ruh desa sendiri malah tidak diakomodasi.

Kuwu ingin punya kabinet sendiri yang nyambung, masa sih kabinetnya orang yang menantang dan melawan dia, tentu psikologinya kan gak

dapat dan membuat gap akhirnya. Akhirnya para penggugat (perangkat desa) kuwu itu seolah-olah yang dimenangkan oleh aturan. Karena kuwu tidak bisa berbuat untuk memberhentikan dan berunding pada regulasi.

### Bagaimana Anda melihat rencana perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017? Apa harapannya?

Kepada legislator, intinya kami berharap, kearifan lokal secara substansinya harus diakomodasi terhadap pasal-pasal Perda tentang Pemerintahan Desa. Diantaranya psikologi kuwu baru, hak asal usul desa, kewenangan kuwu mohon dieksplicitkan.

Adapun soal teknis eksplisitnya pasal per pasal seperti apa, nanti kita dari FKCC melakukan RDP dengan DPRD. Namun, ruh harus ketemu, jadi orang yang bahas soal Perda itu harus orang yang paham bagaimana ruh desa. Bukan dalam konteks negara secara formil yang justru telah menjadikan desa layaknya kawin paksa. Kan gak seru, desa bertepuk sebelah tangan. Kuwu mecat di luar aturan karena aturannya tidak berpihak. •suf

# Ketua Asosiasi BPD Ibnu Katsir Pertegas Peran BPD Sebagai Mitra Kuwu

BPD seringkali dianggap sebagai stempel kuwu. Ada juga yang terus berseteru dengan kuwu. Pembangunan desa jadi tidak efektif. Apa yang perlu diperkuat agar hubungan kuwu dan BPD harmonis?



Foto: Dok. Asosiasi BPD

Sederet persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih ada. DPRD Kabupaten Cirebon berencana merevisi kembali Perda Nomor 1 Tahun 2017. Baik BPD, maupun kuwu harus menjadi mitra yang baik agar tercapainya pembangunan di desa. Untuk mengetahui bagaimana persoalan pemerintahan desa, Redaksi Cirebon Katon mewancarai Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Cirebon, Ibnu Katsir. Berikut petikannya:

**Seperti apa permasalahan BPD sebagai mitra kuwu?**  
Permasalahan BPD di Kabupaten Cirebon cukup rumit. Pertama, masih banyak anggota BPD yang belum memahami regulasi tentang BPD, pun dengan pihak kuwu, baik tentang UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 6, Permendagri Nomor 47 dan Permendagri Nomor 45. Dimana semuanya mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Seharusnya pihak kuwu juga wajib membaca dan

memahami aturan itu. Kemudian permasalahan selanjutnya, banyak perselisihan antara kuwu dan BPD di desa. Ada BPD yang tidak difungsikan oleh kuwu, ada juga BPD yang mengajukan pemberhentian kuwu karena kinerjanya. Ini pun menjadi persoalan yang rumit. Ada lagi BPD yang disuruh untuk mengundurkan diri, karena kinerjanya dianggap kurang baik dalam arti kongkalikong. Intinya menolak mengikuti keinginan kuwu yang sebe-



Foto: Dok. Hasan Ali

Ibnu Katsir, Ketua Asosiasi BPD Kab. Cirebon

narnya melanggar aturan.

**Apa saja yang sudah dipertegas oleh Asosiasi BPD?**

Kami dari asosiasi BPD terus menyuarakan kepada teman-teman BPD se-Kabupaten Cirebon, bahwa kita tetap harus menjadi *controlling* di desa dengan baik. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan program yang disepakati bersama berdasarkan Musrenbangdes masing-masing.

Kita juga selalu memberikan saran kepada teman-teman BPD agar selalu menjaga kondusifitas di desa, artinya menjadi mitra yang sesuai dengan *track*-nya. Selain itu, mengawasi pembangunan di desa dengan memberikan arahan dan saran kepada kuwu. Kita dorong pula, agar

bangun kesolidan dan profesionalitas yang saling mengisi dengan Pemerintah desa agar bisa saling melengkapi kekurangan. Saya kira, ketika BPD dan kuwu berjalan dengan baik, maka desa pun akan sesuai programnya. Bukan sebaliknya, saat terus berselisih, ini akan menjadi kendala dalam menjalankan program bersama. Padahal ketika pemerintahan desa dapat melakukan program pembangunan dengan baik, maka akan terasa manfaatnya bagi masyarakat luas secara keseluruhan.

Selain itu, kita juga telah melakukan advokasi bagi anggota BPD yang bermasalah, baik soal keuangan desa, perselisihan dengan kuwu, maupun lainnya. Sepanjang untuk kepentingan BPD, kami terus melakukan

upaya advokasi, memberikan bantuan hukum secara baik agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Karena yang terjadi acapkali berkaitan soal hukum.

**Bagaimana dengan Perda tentang Pemerintahan Desa dan BPD, Efektifkah?**

Berkaitan soal Perda Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diubah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2017. Saya kira telah banyak yang terealisasikan. Baik berkaitan kuwu maupun BPD. Hanya sedikit barangkali pemerintah desa yang belum memahami tentang isi Perda itu kemudian berselisih.

Secara umum bisa dijalankan dengan baik dan efektif. Namun, tak sedikit pula yang bahkan tidak tahu dan memahami. Saya kira ini menjadi PR bagi kita semua, baik Pemda, untuk selalu melakukan pembinaan kepada kuwu, peningkatan kualitas SDM dan memitigasi penyelewengan.

**Apa harapan dari Asosiasi BPD melalui Perda yang akan direvisi?**

Harapan kami ke depan, pertama, agar bisa mendorong program peningkatan di desa. Memberikan arah kepada BPD maupun kuwu agar selalu kompak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya, kami juga telah mengusulkan melalui Komisi I, beberapa revisi Perda maupun Perbup, salah satunya tentang Perangkat Desa. Ini persoalan yang sampai sekarang masih dilematis selalu menjadi muncul ketika pergantian kuwu, dimana perangkat desa pun ikut diganti.

Padahal tidak demikian, ketika perangkat desa ganti, maka orang yang bekerja di desa itu

orang baru. Yang menurut kami belum memahami aturan UUD, Permendagri, Perda, Perbup, itu tidak bisa dengan 1-2 tahun. Bayangkan, kalau selama 2 tahun baru bisa memahami aturan. Kapan membangunnya? Pembangunan desa akan tercecer dan tertinggal.

Sehingga, pada persoalan ini, kami mengharapkan ada solusi dalam pasal tentang pengangkatan/pemberhentian perangkat desa itu harus ada jeda waktu, atau aturan yang jelas. Misalnya, ketegasan masa bakti perangkat desa itu mengikuti masa bakti kuwu. Atau berkaitan soal umur, sekarang masa pensiun perangkat desa dalam Perda itu 60 Tahun. Barangkali bisa dimundurkan maksimal 50 tahun.

**Bagaimana dengan proses Pilwu?**

Selain itu, persoalan pelik pasca pemilihan kuwu. Dimana telah terjadi pemecatan, pengangkatan yang sepihak oleh kuwu. Alasannya, karena merasa biaya menjadi kuwu itu mahal. Padahal mulai tahun 2017, biaya pemilihan kuwu ditanggung negara. Jadi kalau bicara kuwu telah banyak mengeluarkan biaya saat pencalonan, itu salah. Kalaupun mengeluarkan biaya untuk pengerahan masa itu kan persoalan pribadi. Secara sistem, dalam penyelenggaraan Pilwu, biayanya telah dibebankan oleh anggaran dari negara.

Kami di BPD tidak meminta biaya dari calon kuwu dalam pelaksanaan Pilwu, tapi dari APBDes maupun PAD desa. Oleh karena itu, bukan sebuah alasan logis.

Selanjutnya, soal keterlibatan perangkat desa, Perda ini harus tegas. Artinya, siapapun yang terlibat keberpihakan dalam



proses Pilwu kepada salah satu calon kuwu, maka itu sudah melanggar. Yang terjadi saat ini, ketika kami keliling, perangkat desa yang terbukti ikut membantu salah satu calon diberhentikan oleh kuwu terpilih. Sementara ketika calonnya menang tidak diberhentikan. Ini kan paradigma yang salah. Pasal itu, sudah menjelaskan bahwa siapapun yang ikut terlibat dalam membantu pelaksanaan Pilwu, maka dia harus diberhentikan. Jadi idealnya, mau yang menang atau kalah, ketika terlibat ya harusnya diberhentikan.

Ini yang harus Bupati, DPRD dan Camat, jelaskan secara terukur dengan peraturan yang ada. Memang, secara budaya desa hal itu dibenarkan, tetapi secara aturan, itu berbenturan. Kalimatnya jelas sampai ke pada tahap 'harus mengundurkan diri' ketika terbukti menjadi timses calon kuwu. Saya pikir pasal ini harus diperbaiki secara mengikat dan tegas.

Bupati, Camat, BPD, perangkat desa dan lembaga lainnya di desa harus netral. Siapapun yang terlibat pada salah satu calon, maka harus mengundurkan diri dan kalau tidak mau,

maka harus diberhentikan sesuai aturan itu.

**Selain itu, soal Pilwu ada yang lain?**

Terakhir, pasal berkaitan soal *money politic*, itu juga masih simpang siur dan elastis. Semestinya, calon kuwu yang melakukan *money politic* itu harus diberhentikan dari pencalonan, harus tegas. Baik Perbup, Perda itu tidak tegas. Ini yang kemudian menyulitkan di bawah, baik Panitia Pilwu termasuk juga BPD. Sehingga, banyak BPD maupun Panitia Pilwu merancang aturan sendiri yang berbeda-beda.

Nah, saya kira ini harus menjadi satu pasal dan satu ayat untuk menegaskan, apabila calon kuwu melakukan *money politic*, maka diberikan sanksi. Ini semua dalam rangka menghindari perselisihan di desa, baik antara kuwu terpilih dengan perangkat desa yang baru. Termasuk juga meminimalisasi konflik antara kuwu dengan BPD. Karena pasca Pilwu, selalu saja ada konflik, yang sampai sekarang cukup banyak di Kabupaten Cirebon. •suf

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

## Peduli Desa Membangun

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon berkunjung ke Desa Japura Bakti, sebagai salah satu dari dua desa tertinggal dalam indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020. Kunjungan sebagai kepedulian agar pemerintah desa meningkatkan kinerjanya. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon berkunjung ke Desa Japura Bakti, sebagai salah satu dari dua desa tertinggal dalam indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020. Kunjungan sebagai kepedulian agar pemerintah desa meningkatkan kinerjanya.



Foto-foto : dok sethwan

## Periksa Perpajakan Air Minum

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi PT Sariguna Primatirta (Cleo), produsen air minum dalam kemasan, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan perpajakan air tanah.



Foto-foto : dok sethwan

## Sidak Prasarana Pemadam Kebakaran

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Hotel Apita Cirebon, dalam rangka pengawasan pengelolaan lingkungan dan kelengkapan sarana prasarana pemadam kebakaran.



Foto-foto : dok sethwan

## Periksa pembangunan sarana dan prasarana di SDN 2

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon memeriksa pembangunan sarana dan prasarana di SDN 2 Cikulak Waled, setelah rusak terbakar pada Juli 2020. Kunjungan ini juga sekaligus menjangir aspirasi dari masyarakat untuk mengutamakan perbaikan fasilitas pendidikan



Foto-foto : dok sethwan

## Papan Reklame Roboh



Foto: foto: Ihsan/DK

### Tanya:

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Saya Andi dari Talun,

Mohon izin menyampaikan kejadian papan reklame ambruk yang belum lama ini terjadi di jalan raya arah Kuningan. Saya perhatikan juga di beberapa titik papan reklame seperti tidak terurus dan membahayakan. Pasalnya, kondisi papan reklame tersebut berpotensi roboh. Ditambah kondisi cuaca yang akhir-akhir ini anginnya cukup kencang.

Oleh karena itu, mohon agar dinas atau pihak terkait dapat bertanggung jawab untuk mengecek dan menertibkan papan reklame yang dinilai sudah tidak layak atau perlu diganti. Sehingga tidak akan ada kejadian serupa meskipun tidak ada korban jiwa. Karena ini menyangkut keselamatan banyak orang.

Atas perhatian dan responnya saya haturkan terima kasih, juga kepada redaksi Cirebon Katon yang telah memuat keresahan saya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Andi (35) - Wiraswata - Talun.

### Jawab:

Terimakasih Andi atau surat dan informasinya, akan kami sampaikan ke instansi terkait.



## Adakah Antisipasi Banjir Menjelang Penghujan?

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Datangnya musim hujan harus diwaspadai agar tidak terjadi banjir seperti musim hujan sebelumnya. Upaya-upaya preventif perlu dilakukan, seperti membersihkan sampah pada jalur-jalur air, mengeruk sungai yang dangkal, dan termasuk memastikan saluran air di setiap titik berfungsi.

Oleh karena itu, pihak berwenang agar melakukan upaya-upaya tersebut sambil memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan kesadaran menjaga lingkungan. Sebab ada pepatah bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Kita telah belajar banyak dari musibah banjir yang pernah terjadi. Maka sebagai insan yang beriman dan berakal, sudah semestinya bisa menyikapi dan mengambil pengalaman tersebut dengan melakukan Tindakan-tindakan antisipasi. Jangan sampai kejadian pahit terulang kembali hanya karena tidak amanahnya kita terhadap

tanggung jawab. Karena hal itu berdampak kepada orang lain.

Semoga bisa ditindaklanjuti agar tidak terjadi banjir yang dikhawatirkan.

Terima kasih, mohon maaf jika kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Qomar (22) - Mahasiswa - Gunung Jati.

### Jawab:

Terimakasih Qomar atas masukan dan kepeduliannya.

## Apa Kabar Penanggulangan Covid-19?



### Salam Hormat,

Semoga bapak ibu pemangku kebijakan dan para wakil rakyat senantiasa sehat.

Kasus Covid 19 baik secara nasional maupun lingkup Kabupaten Cirebon masih terus bertambah. Belum ada tanda-tanda wabah ini hilang. Jika sebelumnya gencar dilakukan sosialisasi dan tindakan bagi-bagi masker, bahkan memberlakukan PSBB, namun beberapa bulan terakhir ini fenomena di masyarakat seakan wabah ini sudah tidak ada.

Istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan menggunakan masker pun sepertinya tidak massif berjalan. Kita jumpai banyak kerumunan baik di jalan, tempat nongkrong, bahkan hiburan di hajatan. Kesemuanya mengabaikan anjuran protokol kesehatan, tidak menggunakan masker.

Dengan fenomena tersebut, sebenarnya upaya apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Gugus Tugas yang telah dibentuk?

Demikian, mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, semoga menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih.

Nurul (45) - Wiraswata - Plered.

### Jawab:

Terimakasih Nurul atas kepedulian Anda terhadap kesehatan lingkungan. Teruslah untuk mengingatkan masyarakat di sekitar Anda untuk taat pada protokol kesehatan. Kami akan meneruskan hasil pengamatan Anda ke instansi terkait agar turut mendisiplinkan masyarakat.

## Kerupuk Melarat Kisah Kreatif di Masa Sulit

Sekitar 1929, ia lahir bernama *mares*. Singkatan dari *lemah ngeres*, tanah berkerikil, alias pasir. Maklum, karena kerupuk ini digoreng dengan media pasir.

Memilih pasir bukan tanpa alasan. Namun, bagian dari kreativitas dan inovasi di masa sulit. Kala itu depresi ekonomi hebat sedang melanda dunia. Mencari minyak goreng susah dan tak terbeli. Pasir pun jadi pilihan. "Ternyata rasanya enak juga," ujar Ely (60 tahun) berkisah.

Sekitar 1980-an, kerupuk *mares* berganti nama menjadi kerupuk *melarat*. Pasarlah yang menjulukinya. Para pembeli menyebutnya kerupuk melarat, juga lantaran digoreng dengan pasir. Hingga kini *mares* lebih dikenal dengan *melarat*.

Kini, dunia kembali memasuki masa sulit: pandemi dan resesi. Penjualan drop 50 persen. "Belum lagi harga bahan baku semain naik. Mudah-mudahan corona segera berakhir," ujarnya.

Optimisme dan kreativitas di masa sulit itulah semangat dari kerupuk *mares*. Untuk itu, teruslah berjuang, tak ada istilah sekarat untuk kerupuk melarat! •fik

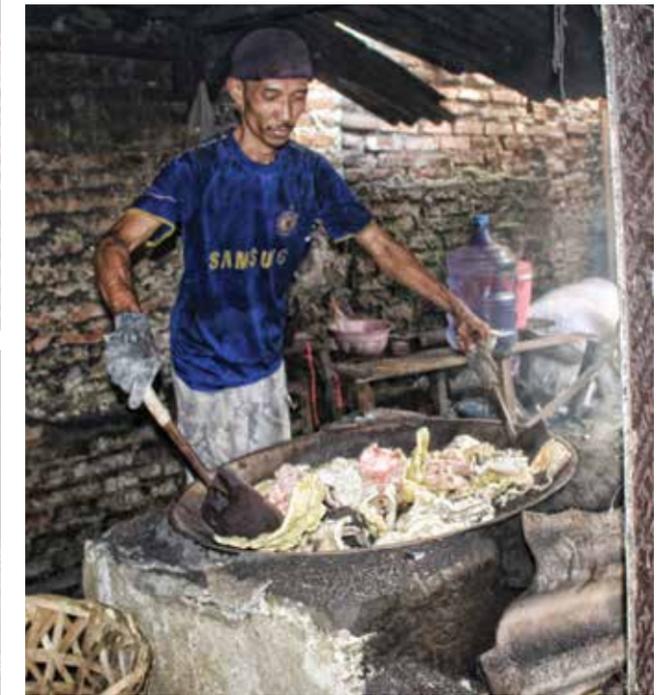


Foto-foto: Alifan/dk

## Komisi I Pantau Tukar Guling Tanah Desa

Tukar guling tanah kas desa seringkali menjadi masalah hukum berkepanjangan. Demi mengantisipasi dan menghindari hal itu, Komisi I meminta agar tertib administrasi dilakukan sejak awal.



Foto: foto-dok setrekan

Kuwu Pangenan dan Camat Pangenan menerima kedatangan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon. Kunjungan kerja ini bertujuan ingin mengetahui secara langsung pengelolaan aset desa yang ada di Desa Pangenan, Kecamatan Pangenan.

Camat Pangenan dalam sesi sambutan menyampaikan bahwa secara keseluruhan kondusifitas di wilayah kecamatan pangenan pada tingkat yang wajar dan bisa terkendali. Sementara terkait dengan pengelolaan aset desa pihak kecamatan sudah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan keten-

tuhan yang ada.

“Mohon saran dan masukan dari Komisi I dan Bagian Pemerintahan agar ada solusi terbaik dari pertemuan di balai desa Pangenan ini,” ungkap Camat Pangenan. Sedangkan, Komisi I menyampaikan maksud kunjungan ke Desa Pangenan terkait dengan pengelolaan aset desa, yakni proses tukar guling aset desa.

Menanggapi hal itu, Kuwu Pangenan menyampaikan dan menjelaskan mengenai aset tanah kas Desa Pangenan yaitu berupa tanah bengkok seluas ± 27 hektar dan tanah titisara seluas ± 40 hektar. Beberapa di-

antaranya digunakan untuk gedung Kantor Kuwu, mushola dan pemakaman.

“Dari tanah kas desa tersebut pada awal kepemimpinan Kuwu telah menghasilkan PADes sebesar Rp. 90.000.000,-. Untuk tahun 2020 ini untuk PADes sebesar Rp. 155.000.000,-” ungkapnya.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon menyampaikan secara garis besar telah terjadi proses tukar guling untuk beberapa aset desa. Proses terakhir tukar guling aset desa yang dimohonkan oleh pihak ketiga yaitu PT. NSP guna pengembangan kawasan industri berupa pembangunan

pabrik plastik.

Proses sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, untuk saat ini hanya menunggu legalitas atas tanah pengganti dari BPN. Berita acara serah terima harus disertakan dengan sertifikat tanah pengganti, hal tersebut menjadi kendala sampai dengan saat ini. Kedepannya kuwu bisa menerbitkan Perdes tentang tukar menukar aset desa, jika sertifikat tanah pengganti sudah dikeluarkan oleh BPN.

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menilai pengelolaan aset desa di setiap desa, selama ini masih jauh dari kata tertib. Oleh karena itu DPRD berharap pertama kedepan pengelolaan aset di setiap desa bisa lebih baik lagi.

Kedua, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon berharap di dalam pengelolaan aset dan keuangan desa seharusnya berpedoman pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif agar tidak ada permasalahan kedepannya di dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Ketiga, diharapkan juga kepada desa untuk semua perjanjian kerjasama dengan warga dan pihak lain agar bisa dibuatkan surat perjanjian kerjasamanya, kemudian dibuatkan Perdesnya serta dimasukkan kedalam PAD desa dan APBDes.

Dalam kunjungan tersebut anggota DPRD yang hadir adalah Moh. Luthfi, M.Si sebagai Ketua DPRD, Abdul rohman, sebagai Ketua Komisi I, Hj. Diah Irwany Indriyati, S.AP sebagai Wakil Ketua Komisi I, Nurholis, S.Pd.I Sekretaris Komisi I, Pandi, SE, I, R. Hasan Basori, SE.,M.S.i, Hj. Amenah, SE, Yayat, H. Sofwan, ST, Suryanti, H. Junaedi, ST, dan Tarseni sebagai Anggota Komisi I. •fir



## Komisi II Temukan Perizinan Usaha Tak Sesuai Tata Ruang

Melalui sistem perizinan online (OSS) PT SPI mendapatkan izin industri. Namun, lokasi perusahaan justru untuk kawasan tanaman pangan.



Foto: foto: dak setawan

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon bergerak menuju Desa Kudukeras, Kecamatan Babakan. Mereka merespon laporan masyarakat, bahwa ada perusahaan di desa tersebut yang diduga tidak memiliki izin industri.

PT Shabila Putri Islam (SPI) sejatinya hanya mengajukan izin pergudangan. Namun, masyarakat menduga ada kegiatan industri di lokasi perusahaan.

CEO PT Shabila Putri Islam, Susi Susilawati, menjelaskan bahwa PT SPI di Desa Kudukeras mempunyai lahan seluas 4.000 persegi. "Awalnya Kami membeli lahan di sini untuk mendirikan

bangunan yang diperuntukkan sebagai industri pupuk kompos yang mengolah blotong tebu dari limbah pabrik gula menjadi pupuk, sebagaimana pabrik utama Kami di Brebes," jelasnya.

Namun, lanjut Susi, ternyata dalam proses mengurus perizinan, diketahui Desa Kudukeras masuk dalam kategori kawasan tanaman pangan dan tidak bisa untuk industri. "Oleh karena itu, kami mengurus perizinan gudang saja, untuk menopang perusahaan kami yang utama di Brebes," paparnya.

Kegiatan yang berlangsung pun, menurut Susi, hanya penyimpanan dan pengeluaran ba-

rang saja. Semua perizinan untuk gudang juga sudah rampung semua. tidak ada yang kurang.

Selain izin gudang, ternyata PT SPI juga mengajukan izin industri via *Online Singel Submission* (OSS), dan telah keluar hasilnya bahwa diperbolehkan untuk industri. "Hal ini membuat bingung kami, namun akhirnya kami tetap menjadikan bangunan ini hanya sebagai gudang dan akan mencari lahan baru untuk pabrik," ujarnya.

Menanggapi hal itu Kasi IMB Dinas PMPTSP Gunarsa mengungkapkan pada pengurusan perizinan ke Dinas PMPTSP, PT SPI menjelaskan bahwa induk

perusahaan berbasis di Jawa Tengah. "Oleh karena itu, kami menyarankan untuk pembangunan gudang saja," jelasnya.

Rekomendasi Dinas Pertanian juga menyatakan bahwa lokasi lahan ada di kawasan tanaman pangan. "Secara otomatis tidak bisa dijadikan tempat industri. Apabila dalam fatwa dan IMB yang sudah ditempuh oleh PT SPI adalah untuk gudang, maka tidak boleh dijadikan industri," jelasnya

Apalagi dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, atau OSS, bahwa pengajuan perizinan dapat dilakukan secara online. Namun setelah perizinan online terbit tidak serta merta perizinan tersebut sah. "Ada poin-poin yang harus dipenuhi diantaranya adalah harus sesuai dengan tata ruang wilayah. Apabila tata ruang wilayahnya tidak sesuai, maka perizinan tidak berlaku," pungkasnya.

Menganggapi pernyataan CEO PT SPI, Dikdik Anjari, sebagai perwakilan dari Dinas Pertanian menjelaskan PT SPI termasuk dalam pengusaha yang tersasar karena minimnya informasi dan mempercayakan semuanya ke konsultan. "Terhadap PT.Shabila, bahwa jika dilihat dari Perda RT/RW memang Desa Kudukeras adalah kawasan tanaman pangan, namun boleh saja jika dijadikan industri sarana prasarana pendukung pertanian, tetapi sekali lagi akan berbenturan dengan pertimbangan teknis/pertek ATR/BPN," ujarnya.

Sedangkan menurut catatan Dinas LH, M.Najib menjelaskan bahwa semua prosedur PT SPI sudah dipenuhi, hanya saja kurang SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.



"Karena usaha yang dilakukan tidak boleh memberikan dampak negatif pada lingkungan," ungkapnya.

Mad Saleh, Ketua Komisi II, menanggapi pernyataan CEO PT SPI mempertanyakan adanya seperangkat mesin dan bahan bakar di dalam gudang, Hal itu yang menjadi perhatian masyarakat sehingga mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD, karena adanya mesin berarti ada kegiatan operasional industri disini. "Apabila memang peruntukannya untuk gudang, maka seyogyanya tidak ada mesin-mesin industri," ujarnya.

Merespon pernyataan Mad Saleh, selaku Ketua Komisi II, Susi Susilawati, meminta maaf

dan mengakui bahwa mesin yang ada bukan untuk digunakan produksi. "Hanya ingin mengetes mesin karena baru dibeli. Mesin itu sendiri nantinya akan dipindahkan ke pabrik yang ada di Brebes," jelasnya.

Sedangkan mengenai bahan bakar, Susi menjelaskan bahwa itu juga buat mencoba mesin baru. "Kami juga membeli bahan bakar berupa batu bara sebanyak satu trek, untuk melakukan tes mesin. Kami hanya pastikan menyala, berikutnya kami pindahkan ke pabrik Brebes. Kami sudah memastikan bahwa usaha kami disini hanya untuk gudang, karena memang sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan industri," paparnya. •fir

## Beberapa Ruas Jalan Rusak dan Terganggu Sampah

Jalan penghubung Desa Babakan dengan Cangkuang rusak bergelombang. Sampah tercecer dan menumpuk di pinggir jalan. Tak hanya itu, Jalan Plumbon – Pangkalan juga rusak.



Foto: foto: dok sethnan

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menemukan adanya ruas jalan berpasir dan bergelombang di Desa Babakan Kecamatan Babakan. Jalan tersebut merupakan penghubung antara Desa Babakan dengan Desa Cangkuang.

Hal ini diketahui saat Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Babakan, didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Camat Babakan.

Dari pantauan langsung di lapangan, koordinator kunjung-

angan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Merdeka menilai, jalan tersebut memang sangat tidak layak untuk dilalui para pengendara yang melintas. Menurutnya, jalan ini harus secepatnya diperbaiki dan ditingkatkan agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan maupun perjalanan.

Selain itu, kata Teguh, akses transportasi yang rusak akan sangat rawan serta membahayakan pengendara. Terlebih jika musim penghujan tiba, yang akan menyebabkan jalan semakin rusak parah.

“Apalagi jika pengendara tidak memperhatikan laju kecepatannya, bisa saja terjadi kecelakaan yang mengancam nyawa,” katanya.

Senada dengan Teguh, Camat Babakan juga mempunyai harapan yang sama mengenai kondisi infrastruktur di Kecamatan Babakan. Ia berharap untuk segera dilakukan perbaikan maupun peningkatan jalan.

Selain kerusakan jalan, persoalan sampah pun tak luput dari perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon dalam kunjungannya. Menurut Teguh,

masalah sampah di Kecamatan Babakan juga belum tertangani dengan baik tak terkecuali di tepi jalan.

Hal itu menjadi keprihatinan bagi Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, dalam upaya pemeliharaan jalan desa Babakan menuju desa Cangkuang.

Teguh menilai, hal ini disebabkan akibat ketidakdisiplinan warga dalam membuang sampah pada tempatnya dengan mengotori tepi jalan, dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah organik maupun non organik. Sehingga, selain membuat macet karena kondisi jalan. Masyarakat yang berlalu-lalang menjadi tidak nyaman akibat bau tidak sedap.

Ia pun, meminta dinas terkait untuk segera melakukan penyiriran jalan dan pengangkutan sampah-sampah yang ada disana.

Menjawab soal itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Sugeng Raharjo, akan melakukan kajian-kajian terlebih dahulu mengenai penanganan ruas jalan yang rusak ataupun pengelolaan sampah yang ada di jalan penghubung antara kedua desa yang telah disebutkan.

Namun, Sugeng bilang, hal ini tidak dapat dilakukan pada tahun ini, mengingat belum ada kegiatan peningkatan jalan. Hal itu akibat refocusing anggaran yang masih terkonsentrasi untuk penanganan pandemi covid-19. “Imbas pandemi Covid-19 berdampak pada pemotongan anggaran beberapa pekerjaan proyek di Dinas PUPR,” katanya.

### Plumbon-Pangkalan Juga Rusak

Komisi III juga mengunjungi jalan Plumbon-Pangkalan. Jalan ini pun rusak cukup parah, terutama dibawah jembatan jalan



tol. Ketua Komisi III Hermanto menjelaskan bahwa jalan yang rendah dan tidak adanya drainase menjadi penyebab kerusakan.

“Konstruksi jalan berbentuk *underpass* merupakan kesepakatan warga dengan pengembang saat pembangunan jalan tol. Warga keberatan jika dibuat *fly over* (menanjak) sehingga disepakati jalan tersebut dibuat dibawah jalan tol (*underpasas*). Namun tidak ada saluran drainase sehingga kerap kali rusak parah dan genangan air hujan tidak cepat surut,” jelasnya.

Kunjungan Komisi III hari itu bersamaan dengan kegia-

tan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh dinas PUPR. Kegiatan pemeliharaan berupa pembuatan saluran drainase sepanjang sepuluh meter. Rangkaian pekerjaan yang dipantau langsung oleh Komisi III.

Komisi III mengapresiasi Dinas PUPR yang bergerak cepat merespon keluhan warga. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan Dinas PUPR menyatakan bahwa “Kegiatan pemeliharaan jalan tersebut masuk dalam rencana kegiatan tahun 2020, sehingga bisa dikerjakan saat ini dan diharapkan selesai tepat waktu,” jelasnya. •suf/fir

## Kurangnya Sarana Belajar SMPN 2 Kapetakan

Dalam upaya melakukan pemantauan terkait sarana prasarana yang ada di sekolah. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke SMPN 2 Kapetakan Kabupaten Cirebon



Foto: doksethan

Wakil ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Ahmad Fawaiz, menjelaskan, selain fungsi legislasi dan kontroling, DPRD juga memiliki fungsi penganggaran atau *budgeting*. Berkaitan dengan fungsi tersebut, ia sangat membuka kesempatan kepada SMPN 2 Kapetakan apabila ada usulan demi perbaikan sekolah ini.

Fawaiz meminta, SMPN 2 Kapetakan agar menyampaikan apa saja usulan demi perbaikan kualitas sekolah. Menurutnya, tanpa usulan dan masukan dari bawah, Komisi IV tidak akan

mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Moch Ghofur Akbar, juga menyampaikan, sebagaimana amanat Undang-undang, bahwa 20 persen anggaran harus diperuntukkan bagi bidang pendidikan. Sehingga dengan besarnya anggaran yang ada, Ghofur bilang, seharusnya dapat memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon.

“Rata-rata angka lama sekolah di Kabupaten Cirebon masih berada pada 7,5 tahun, sangat jauh dengan angka wajib sekolah

12 tahun,” ujarnya.

Menanggapi itu, Kepala sekolah SMPN 2 Kapetakan Andriati Spd, mengatakan sebenarnya minat lulusan SD dan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMPN 2 Kapetakan sangat tinggi. Ia bilang, hal ini didapat dari banyaknya pendaftar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, menurutnya sekolah hanya mampu menerima 829 siswa pendaftar. Hal ini karena keterbatasan ruang kelas.

Selain itu, sekolah juga terbentur pada ketersediaan rombongan belajar (rombel) yang ada. Terdapat 12 rombel yang ada di SMPN 2 Kapetakan Cirebon, yang terdiri dari 4 rombel tiap kelas, 1 ruang laboratorium dan perpustakaan dan toilet siswa berjumlah 5 unit.

“Masih jauh dari cukup untuk sebanyak siswa yang ada. Kurangnya ruang belajar membuat beberapa ruangan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, diantaranya ruang laboratorium, yang seharusnya sebagai ruang pertemuan,” jelasnya

Anggota Komisi IV Hj Nana Kencanawati, mengatakan, kebanggaannya terhadap banyaknya perubahan pada SMPN 2 Kapetakan. Namun ia berharap, pihak sekolah tidak hanya meminta peningkatan rombel, tapi juga harus terus meningkatkan prestasi sekolahnya.

## Belajar Dongkrak Wisata dari Pangandaran

Banyak potensi wisata di Kabupaten Cirebon yang belum dikelola dengan baik. Ada potensi wisata, kuliner, religi. Namun, potensi tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun, melakukan kunker ke DPRD Kabupaten Pangandaran.

Kami komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon sangat senang sekali, bisa berkunjung dan diterima dengan baik di DPRD Kabupaten Pangandaran. Kunjungan ini dalam rangka study pengembangan pengelolaan wisata,” ujar Rudiana, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, sebagai kabupaten yang baru berusia 8 tahun. Kabupaten Pangandaran merupakan salahsatu kabupaten di Jawa Barat, yang dinilai telah berhasil megembangkan potensi pariwisatanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran Subariyo, mengatakan, berdasarkan data hingga Agustus 2020, ada sekitar 244 daya tarik yang aktual maupun potensial telah tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran.

Dengan memiliki panjang garis pantai sejauh 84,5 kilometer dan luas kawasan sampan dan pantai mencapai 636,6 ribu hektare, kabupaten pangandaran didaulat menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selain itu, kabupaten Pangandaran juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Namun, kata Subariyo, dalam menggali potensi dan mengembangkannya wisata tersebut, diperlukan suatu usaha yang sung-



Foto: doksethan

guh-sungguh dengan skala jangka panjang.

“Kabupaten Cirebon harus melakukan itu, dalam melakukan pengembangan wisata. Sehingga diharapkan mampu menaikkan pendapatan asli daerah. Selain juga memperluas sarana rekreasi bagi warga kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Sejauh ini, subariyo bilang, kabupaten Pangandaran memang memiliki aneka ragam daya tarik wisata, baik alam, budaya maupun buatan yang telah membantu menaikkan pendapatan daerah.

Menurutnya, tahun 2020 pendapatan dari sektor pariwisata ditargetkan sebesar Rp 35 milyar, meningkat dari target tahun 2019 yang sebesar Rp. 27,5

milyar. Namun karena pandemi Covid 19 baru tercapai sebesar Rp 9,77 Milyar.

“Situasi pandemi sekarang sangat memukul sektor pariwisata, sehingga berdampak minimnya realisasi pendapatan di Pangandaran. Hal ini membuat kondisi keuangan daerah kabupaten Pangandaran cukup limbung pada penyusunan perubahan APBD 2020, karena sebagian besar penerimaan daerah berasal dari sektor pariwisata,” tandasnya.

Rudiana berharap, dengan kunker ini, dapat membawa satu ilmu yang dapat diterapkan, sehingga dapat mengembangkan destinasi wisata yang ada di kabupaten Cirebon.

# Fraksi Nasdem Kabupaten Cirebon Restorasi untuk Cirebon Katon

Kabupaten Cirebon dianggap masih samar, bahkan peteng, tak terlihat. Untuk itulah, bagi Nasdem, Cirebon harus direstorasi agar *katon*.



Foto: foto Dak: Nasdem

**P**ersoalan publik di Kabupaten Cirebon berderet, mulai dari kemiskinan, kesempatan kerja, sampah, hingga infrastruktur. Semuanya dalam kadar perlu secepatnya diselesaikan. Untuk itu perlu langkah konkret dan menyeluruh.

“Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan secara serius,” ungkap Asep Zaenudin Budiman, Ketua Fraksi Nasdem. Cirebon butuh direstorasi.

Semangat restorasi menggema dalam setiap anggota Dewan Fraksi Nasdem di DPRD Kabupaten Cirebon. Menjadi penyambung lidah rakyat bagi mereka bukan sekedar formalitas, namun diwujudkan dalam program nyata untuk masyarakat. “Nasdem memiliki pro-

gram memberikan bantuan traktor dan mesin air pada petani dan banyak program lainnya,” lanjutnya.

Ketulusan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ternyata berbuah manis. Meskipun Nasdem baru mengikuti dua kali Pemilu, namun torehan prestasi politiknya patut diperhitungkan. Jika pada pemilu 2014 mendapat empat kursi, pada pemilu 2019 mendapat tujuh kursi.

Satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada Partai Nasdem serta kerja keras semua anggota dan pengurus, “Kita sama-sama berjuang. Meskipun baru ikut pemilu dua kali, namun Alhamdulillah hasilnya signifikan. Kuncinya berdoa, semangat, dan

optimis,” jelas Asep.

Setiap anggota Dewan Partai Nasdem harus berkomitmen berada dekat dengan masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan. Upaya-upaya nyata dapat dilakukan oleh setiap anggota melalui komisinya masing-masing. Selain itu dilakukan juga pada saat kegiatan reses.

Upaya yang dilakukan oleh setiap anggota Dewan Fraksi Nasdem merupakan langkah dalam mewujudkan Cirebon katon. “Wujud perjuangan kami adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat dan agar segera dieksekusi oleh dinas terkait. Memaksimalkan setiap anggota Nasdem pada tiap komisi sesuai bidang tanggung jawabnya. Masyarakat ingin kita ke bawah, sehingga anggota harus cepat tanggap melayani masyarakat,” tegas Asep.

Mengawal aspirasi masyarakat dengan semangat restorasi untuk Kabupaten Cirebon lebih baik merupakan komitmen. “Kita berjuang bersama mewujudkan Cirebon katon, agar tidak lagi samar apalagi *peteng*, yang artinya semua masalah bisa selesai,” pungkasnya.

Berikut tujuh anggota Dewan Partai Nasdem dengan semangat restorasi. Mewujudkan Kabupaten Cirebon yang samar dan *peteng* menjadi Cirebon Katon:



**Asep Zaenudin Budiman**  
Cirebon, 17 Juli 1994  
Komisi: 4



**Suryanti**  
Cirebon, 15 Oktober 1983  
Komisi: 1



**Munawir**  
Cirebon, 17 Maret 1973  
Komisi: 2



**Moch. Ghofur Akbar**  
Cirebon, 20 Juni 1991  
Komisi: 4



**H. Hermanto**  
Cirebon, 09 Oktober 1980  
Komisi: 3



**Titi Sumanti**  
Cirebon, 02 November 1978  
Komisi: 2



**Dra. Hj. Tati Suhaeti**  
Cirebon, 10 November 1969  
Komisi: 3

## Asep Zaenudin Budiman Dari Sirkuit Balap ke Gelanggang Politik

Usia muda tidak menjadi penghalang bagi Asep untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui jalur politik. Berawal dari keprihatinannya melihat kondisi masyarakat yang tidak berdaya. “Saya masih menyaksikan banyak masyarakat yang harus dibantu. Termasuk fasilitas dan pembangunan yang harus dinikmati masyarakat,” terang Asep.

Pria kelahiran Cirebon tersebut merupakan sosok muda bertalenta. Bagaimana tidak, di usianya ke 26 tahun namun telah berhasil menjadi legislator. Berlatar belakang sebagai pengusaha, ia terus memberikan peran dan karya terbaiknya untuk masyarakat. Jalan hidup yang ia tempuh tidak lepas dari peran sang inspirator, yakni kedua orang

tua. Keduanya memberi banyak pengaruh positif dalam setiap karir yang ditempuh.

Ketertarikannya dalam dunia politik lahir dari ibundanya. Ia menyaksikan bagaimana peran sang bunda saat menjadi pemimpin desa. Banyak hal ia pelajari, terutama tanggung jawabnya selama 18 tahun memimpin. Sementara darah wirausaha



mengalir dari ayahnya, sehingga ia menjadi pengusaha sukses sebagai kontraktor. “Menjadi pengusaha karena basic bapak sebagai pengusaha dan mamah di politik, karena menjabat kuwu selama 18 tahun,” jelasnya.

Asep merupakan pecinta otomotif. Itu juga merupakan hobi yang mewarnai masa remajanya hingga kini. Dan siapa sangka bahwa pemilik nama panggilan Atep ini juga seorang pembalap. Hampir semua jenis balapan motor pernah diikuti. “Dari kecil suka otomotif, saya sejak kelas 4 SD sudah dikasih motor. Waktu itu motor Yamaha Jupiter. Dulu juga suka balapan, baik liar maupun resmi,” ceritanya.

Balapan baginya bukan seke-

dar gaya-gayaan, namun ajang untuk meraih prestasi. Terbukti dalam sebuah event balapan di Kabupaten Cirebon, ia berhasil menjadi yang tercepat. “Jenis balapan kan banyak, ada road race, gesrek, drag bike dan semuanya saya pernah ikut. Saya juga punya tim otomotif. Pernah tahun 2011 matic race (road race) di Kabupaten Cirebon menjadi juara,” lanjutnya.

Banyak anak muda di Kabupaten Cirebon yang berpotensi menjadi pembalap. Sehingga seharusnya bisa dibina dan disiapkan sirkuit resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. “Dari pada mereka balapan liar di jalan, lebih baik sediakan sirkuit resmi. Juga bisa mendatangkan

income,” terangnya.

Ini pula menjadi bagian perjuangannya di legislatif. Ia berharap pemerintah Kabupaten Cirebon bisa menyediakan ruang pengembangan skill anak-anak muda, seperti sirkuit balap. Sebab generasi muda harus difasilitasi kegiatan yang positif, agar mereka tidak menjadi liar.

Semangat mendedikasikan diri untuk masyarakat tidak lepas dari motto hidupnya. “Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Diantaranya melalui jalur politik. Sebab dari sini saya merasa lebih bisa membantu banyak masyarakat,” jelasnya.

Ia senantiasa berupaya dekat dengan masyarakat. Mendengarkan aspirasi dan mewujudkan apa yang diharapkan sesuai kemampuan. “Sering memfasilitasi kendaraan untuk masyarakat yang hendak melahirkan, termasuk kadang membayar biaya persalinan ketika tidak memiliki BJPS,” lanjutnya.

Politisi muda ini terus mengasah kemampuannya dalam banyak hal, termasuk melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Sebab ia memiliki harapan besar sebagai seorang politisi. Jika di usianya kini telah berhasil menjadi anggota dewan sekaligus ketua fraksi, juga sebagai ketua DPD Partai Nasdem. Maka bukan tidak mungkin harapannya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Cirebon akan terwujud.

“Setiap orang memiliki cita-cita. Hari ini saya menjadi ketua Fraksi, juga ketua DPD Partai Nasdem. Maka jika takdir menghendaki, saya ingin menjadi Bupati. Atau kalau tidak, menjadi anggota legislatif pusat di DPR RI. Semuanya semata-mata agar bisa memberi manfaat yang lebih luas,” pungkasnya. • Mol



## Pengrajin Anyaman Bambu Konsisten Pada Nilai dan Mutu

Konsistensi menjadi kunci bisnis ini. Di tengah kemajuan teknologi, ia tetap bertahan. Bahkan, menembus pasar ekspor.



Foto: foto: Maulana/DK

Dulu anyaman bambu dipasarkan dengan berkeliling kampung. Kerajinan, yang juga disebut dengan pagar atau gribig, ini dipikul dari satu gang ke gang lainnya. Namun, kini pemandangan itu sudah jarang terlihat. Pengrajin memilih pola pemasaran lain.

Pangsa pasar gribig telah bergeser, jika dulu adalah masyarakat umum semua segmen, kini sepertinya terbentuk di segmen menengah ke atas. Tentu saja itu terjadi secara alami, karena perkembangan zaman. Gribig kini mejadi produk eksklusif dan eksotik

yang diminati kalangan terbatas.

Meski semakin tersegmentasi justru itulah yang membuat bisnis ini semakin menggeliat. Pembeli harus antri dan rela masuk dalam daftar pesanan. Terlebih kerajinan ini juga diminati negara lain. Ia sudah menjadi komoditi ekspor.

Daerah pengrajin anyaman bambu di Kabupaten Cirebon terletak di Cibogo, Desa Warujaya, Kecamatan Depok. Hingga hari ini mereka masih tetap eksis meskipun kondisi zaman telah berubah. “Kalau saya usaha anyaman bambu dari tahun 2010,

tapi ini bisnis keluarga yang sudah ada sejak kakek dan saya generasi ke-3. Bapak, paman, dan bibi hampir semuanya menjadi pengrajin,” terang Mufid.

Munculnya pengrajin di daerah Cibogo bermula saat pedagang dari Kuningan menjajakan hasil kerajinan berupa anyaman bambu. Mereka menggunakan tandu membawa hasil kerajinan-nya. Selain itu, wilayah Cibogo terdapat banyak pohon bambu. “Cerita ayah saya sewaktu masih hidup, dahulu disini banyak bambu. Kemudian melihat orang gunung menjajakan hasil



kerajinan bambu dan kemudian bertanya cara membuatnya," cerita Mufid.

Memanfaatkan sumber daya yang ada, mereka mulai belajar menganyam. Lambat laun menjadi aktivitas yang ditekuni dan menghasilkan, bahkan menjadi usaha keluarga yang berkelanjutan. Berawal dari memasarkan produk kerajinan dari rumah kerumah hingga kini memiliki *show room* dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi.

Tahun terus berganti, perubahan banyak terjadi termasuk dalam gaya bangunan rumah. Jika dahulu masyarakat umumnya menggunakan anyaman bambu untuk dinding dan langit-langit, kini mereka di hadapkan dengan banyak pilihan produk. Dinding dari bata dan beton, sementara langit-langit dari beragam produk seperti GRC dan sebagainya.

Meski demikian, kerajinan

anyaman bambu masih memiliki tempat di hati masyarakat. Sebab hingga kini tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakannya. "Di tengah banyak produk modern, namun Alhamdulillah masih bisa bersaing. Ada eternit, GRC, dan lainnya. Masih banyak orang yang masih mencari anyaman bambu yang lebih alami," jelas Mufid.

Konsumen banyak berasal dari wilayah tiga Cirebon bahkan pernah ekspor melalui tangan kedua. Konsumen datang langsung ke *show room* untuk memilih anyaman bambu dan ukuran yang diinginkan. Konsumen pun tidak perlu bingung atau repot memasang, sebab disediakan jasa pasang. "Konsumen banyak dari Wilayah 3 Cirebon. Pernah juga ekspor ke Arab Saudi," terangnya.

Jumlah permintaan yang tinggi terkadang membuat Mu-

fid pelanggan harus rela antri. Mufid juga mendatangkan anyaman bambu dari pengrajin daerah lain, seperti Kuningan. Hal ini menunjukkan bahwa produk anyaman bambu tidak kehilangan pesona di masyarakat. Apalagi saat ini banyak konsep tempat makan bernuansa tempo dulu dengan sentuhan tradisional. Mereka menggunakan anyaman bambu untuk membuat kesan klasik.

Nilai klasik, alami, dan eksotik itulah yang menjadi nilai jual anyaman bambu. Terlebih mampu bertahan hingga beberapa puluh tahun. "Kualitas dan pemilihan bahan kita utamakan," jelasnya.

Meskipun dengan proses manual dan bahan alami, harga anyaman bambu masih cukup terjangkau. "Kita ada dua jenis bahan, yaitu kulit dan isi. Harga kulit bisa dua kali lipat yang

isi. Jika yang isi sekalian pemasangan harganya Rp 30rb/meter persegi dan Rp 15rb hanya untuk bahan. Sementara untuk kulit harganya Rp 40rb/meter persegi dengan pemasangan," jelasnya.

Pertimbangan konsumen memilih anyaman bambu dibanding produk lainnya beranekaragam. Beberapa diantaranya adalah menilai produk anyaman bambu ini lebih tahan lama, alami, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. "Alasan menggunakan bilik karena adem, masih alami, dan sirkulasi udaranya bagus. Kelebihannya tahan lama, dari belum punya anak sampai sudah punya cucu," jelas Nurhayati salah seorang konsumen.

Sebagai pengrajin sekaligus pedagang, Mufid terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dilakukan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan, sehingga mereka akan tetap memilih produknya. "Kita utamakan *service* yang baik, seperti pemasangan yang rapih dan tepat waktu. Misalnya minta Senin ya saya Senin selesaikan," jelas Mufid.

Tantangan yang dihadapi Mufid dan para pengrajin selain persaingan produk adalah ketersediaan bahan. Saat ini bambu sebagai bahan baku utama didatangkan dari daerah Kuningan, sebab lahan yang dahulu banyak tanaman bambu telah berubah menjadi perumahan. "Sekarang cari bambu susah, jadi bahannya didatangkan dari Kuningan. Jika punya lahan sih inginnya menanam sendiri," ungkapnya.

Jika Mufid merupakan generasi ketiga yang masih bertahan untuk menjadi pengrajin dan pedagang anyaman bambu. Maka tugasnya untuk dapat



melanjutkan pada generasi berikutnya. Sebab kerajinan anyaman bambu ini bukan hanya sekedar usaha, namun merupakan kearifan lokal yang harus dijaga. Kita sebagai masyarakat pun hendaknya terus mendukung mereka.

Mufid bersama pengrajin lainnya secara mandiri menjaga dan mempertahankan usahanya. Mereka tidak menengadahkan tangan kepada pemerintah atau pihak lain. Justru mereka membuka lapangan pekerjaan dengan konsep pemberdayaan. Mereka menghargai hasil karya

warga yang menganyam dengan memberikan sejumlah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

"Harapan kedepan semoga masyarakat masih banyak yang menggandrungi dan mencintai produk yang alami, seperti anyaman bambu. Kita juga bisa memperbaiki *service*, bahan dan pemasangan yang lebih bagus. Saya juga berharap bisa melengkapi produk pendukung usaha, seperti menyediakan papan dan kebutuhan material lainnya," pungkasnya. •Mol

## Pagar Gunung Sejuk Bak Dikelilingi Gunung

Tiga kata yang mewakili Kawasan Pagar Gunung: hijau, udara segar, dan sejuk. Kini potensi alam itu sedang diupayakan akan menjadi wisata andalan. Wisatawan dari luar daerah pun melirik dan berdatangan.



Foto: foto: Maulana/dk

Meski berada di daerah pantai utara (pantura), Kabupaten Cirebon tidak semuanya berhawa panas. Pagar Gunung, di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang, begitu sejuk dan dingin. Ia berpotensi berpotensi menjadi wisata alam, layaknya kawasan Puncak, Bogor. Selain dingin, pemandangan di bagian barat Cirebon ini begitu indah.

Saat kendaraan melaju memasuki Desa Cipanas, kesan Cirebon yang panas masih terasa. Namun, tak berapa lama, kendaraan memasuki area hutan. Jalanan berkelok dengan kontur tanah naik turun. Melaju dibawah pohon yang menjulang tinggi dengan suasana sunyi, kesejukan

pun mulai dapat dinikmati.

Pengalaman pertama yang sangat mengesankan. Potensi alam yang bisa dieksplorasi menjadi tempat wisata. "Potensi pariwisata di Kabupaten Cirebon bagian barat itu banyak, di antaranya ada Gunung Koneng yang biasa digunakan untuk camping. Ada hutan pinus atau dikenal Pasir Parat bisa dijadikan bumi perkemahan," jelas Asep, anggota Dewan Fraksi Nasdem yang juga kediamannya dekat dengan lokasi.

Meskipun belum viral di media sosial ataupun menjadi pilihan utama wisatawan, namun lokasi ini sangat potensial. Sudah ada beberapa pengunjung yang datang, bahkan dari luar kota.

"Secara resmi memang belum dibuka, karena masih mengurus perizinan dan persoalan lainnya. Namun sudah bisa dikunjungi," jelas Sumantri, Sekretaris Desa Cipanas.

Setidaknya ada dua lokasi yang bisa di kunjungi wisatawan. Pertama, Pasir Parat. Lokasi ini merupakan hutan pinus dengan suasana sejuk, hijau, dan luas. Pengunjung bisa bersantai menikmati suasana alam hutan atau berkemah. Kedua, Gunung Koneng, merupakan bukit yang dapat didaki oleh pengunjung dan melakukan camping. Mereka akan disajikan hamparan pemandangan yang indah.

Pembangunan lokasi wisata Gunung Koneng berawal



dari seorang pemuda yatim. Ia mengajak para pemuda untuk membuat gebrakan di kampung. Secara sukarela dan semangat gotong royong mereka menata area gunung dan membuat jalur pendakian. "Awalnya ada anak muda ikut menjaga parkir disana (Bukit Sandora), kemudian si Mulyana membuat disini (Gunung Koneng)," terang Imi, seorang warga setempat.

Hingga lima bulan berjalan, pengelolaan lokasi wisata khususnya Gunung Koneng dilakukan oleh pemuda setempat. Secara terjadwal mereka bergantian berjaga, baik parkir ataupun pos depan lokasi tiket. "Biaya masuknya lima ribu, parkirnya dua ribu, jika bermalam sepuluh ribu," lanjutnya.

Adanya lokasi wisata ini

turut menggeliatkan perekonomian warga setempat, meskipun belum secara maksimal. Sebab semuanya masih dalam penataan dan pengembangan. Melihat potensi yang ada, kedepan warga akan diuntungkan secara ekonomi. "Sementara ini pendapatan baru dari parkir dan beberapa pengunjung yang jajan, tapi lumayan ada peningkatan penghasilan," pungkasnya.

Pengunjung yang datang tidak hanya dari Cirebon. Ada pengunjung dari luar daerah seperti Indramayu hingga Jakarta. Mereka datang secara berkelompok untuk bercamping dengan peralatan yang lengkap. "Kita dari Indramayu, tahu lokasi ini dari media sosial terus pakai google map kesininya," jelas pengunjung dari Indramayu yang

baru saja selesai camping dan hendak pulang.

Selain Pasir Parat dan Gunung Koneng sebagai destinasi wisata, daerah Pagar Gunung desa Cipanas juga terkenal sebagai penghasil anyaman bambu dan sintesis. Warga setempat terutama ibu-ibu banyak beraktivitas sebagai pengrajin. Mereka menghasilkan produk anyaman seperti cepon dan grinyan. "Sudah 50 tahunan ada, sejak masih gadis kayaknya saya menjadi pengrajin," terang Suyati, salah seorang pengrajin.

Selama ini mereka menganyam dan memasarkan hasilnya ke pasar Rajagaluh. Jika lokasi wisata Pasir Parat dan Gunung Koneng ramai dikunjungi wisatawan, maka pemasaran hasil kerajinan pun terbantu. Produk mereka bisa dijadikan oleh-oleh yang dibawa wisatawan.

Tantangan yang dihadapi berkenaan dengan perizinan. "Tanahnya itu milik perhutani, kita belum tahu nanti kesepakatannya bagaimana. Jangan sampai setelah jadi, nanti masyarakat tidak begitu menikmati hasilnya. Jadi kita perlu kesepakatan terlebih dahulu," ujar Sekdes Sumantri.

Selain perizinan dan komitmen antara masyarakat, pemerintah desa, dan perhutani, kesediaan infrastruktur perlu diperhatikan. Secara medan sebetulnya cukup terjangkau dengan akses yang mudah. Namun memang ada beberapa titik jalan yang harus diperbaiki.

"Saya sudah menghubungi Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Cirebon dan mengajak kesana agar bisa dibantu pengembangan pariwisata yang ada," jelas Asep. Semoga potensi itu segera menjadi destinasi utama nan sejuk. • Mol

Mohamad Luthfi



## Masker

Enam bulan sudah masker menjadi 'pakaian wajib' dalam berinteraksi sosial. Entah sampai kapan. Vaksinasi yang dianggap sebagai *game changer* (pengubah permainan) masih belum bisa dipastikan kapan bisa dilaksanakan.

Selama enam bulan, tentu saja banyak masyarakat yang berbeda dalam menyikapi sifat 'wajib' masker. Ada yang mengacuhkan, *ogah* memakai masker. Ada yang memakai ketika menghadapi pemeriksaan saja, atau kepergok petugas saat pemeriksaan, sehingga terpaksa memakai.

Ada juga yang sekadar formalitas memakai, asal nempel dan mengait di daun telinga, posisinya cuma di bawah dagu, tak menutupi hidung dan mulut. Tak sedikit juga yang disiplin, selalu memakai masker ketika kontak sosial.

Sekitar tiga bulan setelah himbauan bermasker, seorang tenaga kesehatan (*nakes*) bercerita bahwa orang yang mengeluh sakit berkaitan dengan pernafasan berkurang. Keluhan seperti batuk dan pilek hampir tidak ada. Analisisnya, karena pemakaian masker dan mengurangi mobilitas.

Namun, penyakit berkaitan dengan asam lambung meningkat. Ini disinyalir karena pasien stres menghadapi kenyataan pembatasan kegiatan, dan penyesuaian dengan kebiasaan baru. Terlebih, sumber ekonomi dan penghidupannya semakin sempit.

Kondisi itu wajar, maklum semuanya juga kaget dan tidak siap menghadapi pandemi yang tidak terduga sebelumnya. Justru, yang patut disyukuri dari cerita *nakes* di atas adalah soal manfaat langsung bermasker.

Bermasker yang awalnya diniatkan untuk mencegah tertular covid-19, ternyata juga memberikan manfaat menghindari penyakit lainnya. Masker mencegah sesuatu penyakit masuk ke dalam tubuh, juga mencegah penyakit yang ada dalam tubuh menular ke tubuh orang lain.

Dengan fungsi yang seperti itu, masker bisa memberikan pelajaran yang lebih mendalam bagi

manusia. Bahwa seharusnya memang setiap saat manusia membentengi diri dari hal negatif yang berasal dari luar. Juga sebaliknya, mencegah sesuatu yang negatif keluar dari diri kita, agar tidak berdampak buruk bagi orang lain.

Manusia harus melindungi diri pengaruh pikiran negatif orang lain. Juga mengelola diri agar tidak berpikir negatif, dan meracuni pikiran orang lain.

Selain badan dan pikiran, hati manusia harus terbebas dari rangsangan negatif dari luar. Tidak berprasangka negatif, iri, dengki, dan hasad. Hati harus terbebas dari kesombongan, tampil jujur, dan berpegang tegus pada kebenaran. Sehingga, tidak memancing penyakit munculnya hati pada orang lain.

Pandemi ini bukan hanya mengingatkan kita untuk hidup bersih secara fisik, tapi juga bersih secara pikiran dan hati. Jika tidak maka akan muncul penyakit lainnya, seperti stres yang diceritakan *nakes* di atas.

Bahkan, bukan hanya sekadar stres. Covid-19 juga mengingatkan betapa bahayanya pandemi berupa pikiran negatif dan hati yang kotor. Apa yang terjadi jika semakin banyak orang yang berikiran negatif dan berhati keras? Membentuk kluster-kluster dan menyebar begitu cepat seperti Covid-19?

Jangan-jangan, justru sebaliknya, penyakit pikiran dan hati kotor telah dan lebih merebak ketimbang Covid-19. Bisa jadi begitu. Silakan renungkan dan introspeksi diri.

Untuk itu mari menyikapi Covid-19 ini dengan pikiran positif dan hati yang bersih. Sehingga ia tidak menimbulkan penyakit komplikasi yang lebih dahsyat. Hadapilah dengan hati dan pikiran yang ringan, meski tetap serius dan sungguh-sungguh.

Lihatlah para produsen dan pengrajin masker. Mereka menghadapi pandemi dengan positif, dianggap sebagai peluang usaha. Mereka berkreasi menghasilkan berbagai macam bentuk dan model masker. "Meski pakai masker, tetap tampil cantik dong...," ujar mereka.



SEKRETARIAT DPRD DAN SELURUH PEGAWAI

# ADAPTASI KEBIASAAN BARU

# WAJIB PAKAI MASKER

#JagaKesehatan  
#PakaiMasker  
#JagaJarak  
#PerangiCovid





PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

# ADAPTASI KEBIASAAN BARU

## WAJIB PAKAI MASKER



**#JagaKesehatan**  
**#PakaiMasker**  
**#JagaJarak**  
**#PerangiCovid**